

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Bentuk ilmu akuntansi yang diterapkan melalui bermacam proses serta memenuhi prinsip berlaku akan menghasilkan produk akhir yaitu laporan keuangan. Laporan keuangan yang bisa dipertanggung jawabkan jika didalam penyajiannya mampu memenuhi kriteria secara wajar. Tujuan pemenuhan laporan keuangan adalah memberikan informasi mengenai posisi keuangan, kinerja keuangan, dan arus kas entitas yang bermanfaat bagi pengguna laporan keuangan dalam pembuatan keputusan ekonomi (IAI, 2017). Laporan Keuangan merupakan serangkaian kegiatan keuangan yang didalamnya meliputi proses pengidentifikasian, pengukuran, pencatatan, dari seluruh kegiatan transaksi ekonomi dalam suatu lingkup pemerintah daerah. Hasil dari laporan keuangan yang berkualitas dijadikan sebagai informasi yang berguna dalam rangka pertanggungjawaban pengelolaan keuangan pihak akuntansi dan pengambilan keputusan ekonomi untuk pihak yang membutuhkannya. Hal tersebut merupakan pengertian dari Laporan Keuangan Pemerintah Daerah /LKPD (Erlina dkk, 2015: 19).

Dengan adanya Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2010 tentang SAP (Standar Akuntansi Pemerintahan) yang mulai diberlakukan sejak tahun anggaran 2015, Standar Akuntansi Pemerintahan memiliki pemahaman yaitu prinsip-prinsip akuntansi yang harus diterapkan untuk memperoleh hasil

laporan keuangan yang berkualitas baik. Untuk dapat mewujudkan tata kelola yang baik (*good governance*) pemerintah harus melakukan berbagai upaya-upaya yang dapat menciptakan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah (Rahmah dan Zulkifli, 2018).

Keseluruhan kegiatan pengelolaan keuangan meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan keuangan daerah. Dalam hal pengelolaan keuangan daerah, pemerintah daerah telah menetapkan tujuan dan sasaran yang kemudian membuat rencana kegiatan untuk mencapai hal tersebut. Pengelolaan keuangan daerah perlu ditunjang oleh pemahaman sistem akuntansi keuangan daerah agar penatausahaan keuangan di daerah memiliki akurasi dan akuntabilitas yang tinggi. Sistem akuntansi keuangan daerah yang memadai dapat memberikan bantuan untuk memverifikasi transaksi-transaksi agar dapat ditelusuri dana-dana sesuai dengan tujuannya, serta mengecek otoritas, efisiensi, dan keabsahan pembelajaan dana. Melihat pentingnya peranan dalam pengelolaan dan aturan yang jelas dalam penyusunan laporan keuangan daerah dalam menghasilkan laporan keuangan yang berkualitas maka tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh pengelolaan keuangan daerah dan sistem akuntansi keuangan daerah terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah (Defitri, 2018).

PP No.71 Tahun 2010 mengatakan kualitas karakteristik suatu laporan keuangan pemerintah yaitu suatu prasyarat normatif yang sangat dibutuhkan sehingga laporan keuangan pemerintahan bisa memberikan kualitas yang

diinginkan, yaitu relevan, handal, dapat dibandingkan, dan dapat dipahami. Dalam proses mengelola keuangan daerah yang ada dalam suatu instansi haruslah disusun dengan semaksimal mungkin agar menghasilkan pengelolaan keuangan yang efektif. Suatu laporan keuangan daerah dikatakan berkualitas jika mampu memberikan informasi yang mudah untuk dipahami, bisa memenuhi kebutuhan yang diperlukan pemakainya dalam mengambil suatu keputusan, bebas dari arti yang menyesatkan dan kesalahan dalam material serta bisa untuk diandalkan dan juga dapat dibandingkan dengan laporan-laporan terdahulu (Ikyarti dan Aprila, 2019)

Laporan keuangan adalah produk yang dihasilkan oleh disiplin ilmu akuntansi, sehingga sebagai bentuk pertanggungjawaban, penyajian laporan keuangan harus memenuhi prinsip akuntansi yang berlaku umum dan disajikan secara wajar. Sesuai dengan Peraturan Pemerintah no.71 tahun 2010 Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) dikatakan yang berkualitas adalah laporan keuangan yang disajikan oleh entitas pelaporan yang memiliki empat karakteristik yaitu relevan, andal, dapat dibandingkan dan dapat dipahami. Dari pemenuhan keempat prasyarat normatif yang mutlak tersebut, barulah laporan keuangan pemerintah mempunyai nilai dan manfaat yang berkualitas. (Mahardini dan Miranti, 2018)

Faktor pertama yang mendukung adanya kualitas laporan keuangan dipemerintahan adalah Standar akuntansi pemerintahan. Standar akuntansi pemerintahan merupakan prinsip akuntansi yang ditetapkan dalam membuat, menyusun, dan menyajikan laporan keuangan oleh pemerintah. Sebagaimana

Peraturan Pemerintah no.71 tahun 2010 tentang penerapan SAP berbasis akrual telah ditetapkan, laporan keuangan dikatakan berkualitas jika memenuhi prasyarat yang normatif yaitu relevan, handal, dapat dibandingkan dan dapat dipahami. Dalam mengelola keuangan pemerintah yang didalamnya ada instansi haruslah disusun semaksimal mungkin agar memaksimalkan hasil dan berjalan dengan efektif sesuai dengan peraturan dan undang-undang yang telah ditetapkan sebagai standar akuntansi pemerintahan. Adapun penetapan standar akuntansi dalam laporan keuangan pemerintah adalah berbasis akrual, untuk pengakuan LO, beban, aset, kewajiban dan ekuitas. Basis akrual LO berarti pendapatan telah diakui saat hak untuk memperoleh pendapatan telah terpenuhi walaupun kas belum diterima direkening kas umum Negara ataupun Daerah. (Mahardini dan Miranti, 2018)

Faktor kedua yang mempengaruhi kualitas laporan keuangan adalah kompetensi sumber daya manusia. Seorang individu mempunyai kompetensi akan melakukan pekerjaan dengan kemampuan dan keterampilan sehingga mempermudah dalam bekerja secara cepat, intuitif dan mampu menetralkan kesalahan pekerjaan oleh karena itu harus dipastikan bahwa pengelolaan sumber daya manusia secara baik mampu berkontribusi secara optimal. Kompetensi sumber daya manusia merupakan kemampuan seorang individu, kelembagaan atau suatu sistem untuk melaksanakan suatu fungsi atau kewenangan untuk mencapai tujuan secara efektif dan efisien. Kapasitas harus dilihat sebagai kemampuan untuk untuk mencapai tujuan kinerja yang

menghasilkan (*output*) keluaran-keluaran dan hasil-hasil (*outcomes*). (Rusvianto dan Yuliafitri, 2018).

Faktor ketiga yang mempengaruhi kualitas laporan keuangan yaitu Pemanfaatan Teknologi Informasi. Pemanfaatan teknologi informasi mampu mengurangi suatu kesalahan dalam pemrosesan data sehingga laporan keuangan menjadi andal. Selain itu teknologi informasi mampu dimanfaatkan ketika kualitas dan kuantitasnya baik sesuai kebutuhan untuk penunjang yang dibutuhkan. Pengawasan juga perlu dilaksanakan dalam keuangan daerah juga mempengaruhi pelaporan keuangan pemerintah yang didalamnya memuat berbagai informasi. sehingga teknologi informasi memiliki kelebihan dalam keakuratan serta ketepatannya dalam mengurangi kesalahan yang terjadi dalam pekerjaan penyusunan laporan keuangan. (Ardianti, 2018).

Faktor keempat yang mempengaruhi kualitas laporan keuangan adalah Sistem Pengendalian Internal. Sistem Pengendalian Internal Pemerintah Menurut Peraturan Pemerintah no.60 tahun 2008 menjelaskan adanya proses yang sangat integral dalam suatu tindakan dan kegiatan harus dilakukan secara berulang kali oleh seorang pimpinan, adapun keseluruhan pegawai harus mampu memberikan suatu jaminan yang memadai dalam suatu tujuan organisasi melalui kualitas laporan keuangan yang handal, keamanan aset negara, efektif, efisien dan ketaatan dalam peraturan peundang-undangan yang berlaku. SPIP bertujuan untuk memberikan keyakinan demi tercapainya efektivitas dan efisiensi dalam penyelenggaraan kegiatan pemerintahan dan

mematuhi ketaatan terhadap peraturan perundangan-undangan (Ikyarti dan Aprila, 2019)

Faktor kelima yang mempengaruhi kualitas laporan keuangan yaitu Sistem Akuntansi Keuangan Daerah. Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut (UU No.17, 2003). Keseluruhan kegiatan pengelolaan keuangan meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan keuangan daerah. Pengelolaan keuangan daerah perlu ditunjang oleh pemahaman sistem akuntansi keuangan daerah agar penatausahaan keuangan di daerah memiliki akurasi dan akuntabilitas yang tinggi. sesuai dalam permendagri No. 13 tahun 2006 tentang Pedoman pengelolaan keuangan daerah, yang menjelaskan bahwa pengelolaan keuangan daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan keuangan daerah. Dan peraturan tersebut diperkuat dengan keluarnya Permendagri No. 59 Tahun 2007 yaitu Sistem Akuntansi Keuangan Daerah merupakan serangkaian prosedur mulai dari proses pengumpulan data, pencatatan, pengikhtisaran, sampai dengan pelaporan keuangan dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APBD yang dapat dilakukan secara manual atau menggunakan aplikasi komputer. Jika sistem akuntansi keuangan daerah

dalam dilaksanakan sesuai dengan ketentuan maka laporan keuangan yang akan dihasilkan juga akan jadi lebih baik dan berkualitas (Defitri, 2018)

Pemerintah Kabupaten Pati merupakan contoh salah satu entitas pelaporan keuangan yang harus melakukan penyajian keuangan kepada BPK sebagai bentuk pertanggungjawaban. Hal tersebut wajib diterapkan pemerintah Kabupaten Pati perihal dari penguasaan dan pengendalian penuh atas sumber daya yang mutlak dikuasi oleh Pemerintah Kabupaten Pati. Dalam penggunaan sumber-sumber tersebut Pemerintah kabupaten Pati wajib memberi dampak yang luas terhadap kesejahteraan dan ekonomi masyarakatnya. Hal ini bisa kita lihat pada media berita dan www.semarang.bpk.go.id pemerintahan Kabupaten Pati dimana laporan keuangan pemerintah daerahnya kembali mendaapat WTP kembali secara 5 tahun berturut-turut yang di berikan BPK RI perwakilan jawa tengah lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 1.1

**Daftar Opini Audit BPK atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten
Pati Tahun 2012 – 2019**

No	Tahun	Opini
1	2012	Wajar Dengan Pengecualian
2	2013	Wajar Dengan Pengecualian
3	2014	Wajar Dengan Pengecualian
4	2015	Wajar Tanpa Pengecualian
5	2016	Wajar Tanpa Pengecualian

6	2017	Wajar Tanpa Pengecualian
7	2018	Wajar Tanpa Pengecualian
8	2019	Wajar Tanpa Pengecualian

Sumber: semarang.bpk.go.id yang diolah

Berdasarkan tabel di atas menjelaskan bahwa ada beberapa perubahan opini yang diterima oleh entitas Kabupaten Pati terhadap laporan keuangan pemerintah daerahnya. Dapat diambil kesimpulan yaitu Pemerintah Kabupaten Pati mampu meningkatkan kualitas laporan keuangan pemerintah daerah dari opini wajar dengan pengecualian (WDP) untuk kurun waktu 2012 sampai 2014 meningkat menjadi opini wajar tanpa pengecualian (WTP) untuk kurun waktu 2015 sampai 2019. Perubahan atas opini yang diterima oleh Pemerintah Kabupaten Pati atas laporan keuangan pemerintah daerahnya menunjukkan bahwa adanya peningkatan kualitas laporan keuangan pemerintah Kabupaten Pati. Meskipun mendapatkan penghargaan Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), pihak Pemerintah Kabupaten Pati masih harus memperbaiki laporan keuangannya dan melakukan pengawasan terhadap setiap pelaksanaan kegiatan secara ketat terarur.

Melihat berita yang beredar diberbagai media sosial beberapa tahun belakangan ini sangat memprihatinkan, sebab pada kenyataanya kondisi dilapangan berbeda jauh saat berbeda dilingkup pemerintahan kabupaten pati. Masih banyak oknum pegawai organisasi perangkat daerah ataupun unit pembantu teknisnya melakukan tindak pidana korupsi, meskipun mendapat predikat laporan keuangan wajar tanpa pengecualian, masih ada saja salah satu

oknum pekerja tertangkap (OTT) operasi tangkap tangan secara langsung oleh komisi pemberantasan korupsi saat pelaksanaan kegiatan.

Tahun 2019 tanggal 11 oktober bersumber dari www.pasfmpati.com salah satu anggota Unit Pengelolaan Kemiskinan di Kecamatan Kayen (UPK) Pati yang merupakan salah satu Unit Pelaksana Teknis dari Pemda Pati Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Pati, kini harus berurusan dengan pihak kepolisian setempat. Pasalnya salah satu anggotanya UPK yaitu ketua kelompok simpan pinjam wanita (SPP) telah mengemplang uang Negara yang telah dianggarkan Pemerintah Daerah dan dikelola UPK Syech Jangkung Daerah Kecamatan Kayen guna penanggulangan Kemiskinan di daerah, upaya Polres Pati membongkar tersangka oknum berinisial TS usia 36th yang melakukan tindak pidana korupsi di UPKD Syech Jngkung unit Kecamatan Kayen selama satu tahun membuahkan hasil. Polisi akhirnya menangkap tersangka pelaku pengemplang dana dari pemerintah yang akan disalurkan guna penanggulangan kemiskinan di Kecamatan Kayen, akibatnya perbuatan pelaku, Negara mengalami kerugian Ratusan juta. Keterangan dari AKBP John Wesly Arianto setelah dilakukannya proaes audit memunculkan kerugian Negara sebesar kurang lebih 260 juta. Modus tersangka diketahui dengan menginvitarisir E-KTP untuk diajakukan usulan dana kemiiskinan kepada pemerintah. Polisi menyita bukti satu bendel arsip dokumen palsu pelaku yang palsu. Pemasalahan utama di entitas UPKD unit Kecamatan Kayen antara lain kurang bermutu dan handalnya kualitas Kompetensi Sumber Daya

Manusianya, serta kurang adanya penerapan Pengendalian Internal yang berulang-ulang untuk pengawasan laporan keuangan secara menyeluruh.

Tahun 2020 tanggal 16 april kembali lagi terdapat kasus atas program pemerintah Kabupaten Pati, bersumber dari www.murianews.com yaitu Kasus penggelapan dana program Pemerintah Daerah untuk Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap Sistematis (PTSL) di Desa Alas Dowo, Kecamatan Dukuhseti Pati yang dimana melibatkan 3 orang tersangka yaitu satu kades non-aktif yang divonis penjara lima bulan, dan 2 Aparatur Sipil Negara (ASN) divonis hukuman penjara 6 bulan. Setelah melalui Tiga Belas kali persidangan oleh Hakim Pengadilan Negeri Pati, Tiga tersangka tersebut terbukti melakukan penggelapan dana dari pemerintah dan juga melakukan pemungutan uang secara ilegal kepada warga Desa Alas Dowo atas program gratis dari pemerintah, senilai Enam Ratus Ribu Rupiah per sertifikat tanah. Dari hasil pemeriksaan Pengadilan Negeri Pati atas kasus ini Negara dan warga Desa Alas Dowo pun juga mengalami kerugian ratusan juta rupiah. Adapun penyitaan uang yang digelapkan oleh oknum tersebut kini sedang ditangani Polda Jateng. Banyaknya kasus korupsi yang terjadi disebabkan kurangnya berkualitasnya Kompetensi Sumber Daya Manusia, kurangnya pengawasan dan pengecekan berangsur terhadap Sistem Pengendalian Internal dari pihak Dinas terkait dan kurang efektifnya penerapan pemanfaatan teknologi dalam menunjang jalannya program pemerintah tersebut.

Laporan keuangan yang berkualitas menunjukkan bahwa kepala daerah bertanggungjawab sesuai dengan wewenang yang dilimpahkan kepadanya

dalam pelaksanaan tanggung jawab mengelola organisasi (Defitri, 2018). Kualitas laporan keuangan pemerintah daerah yang dihasilkan pemerintah daerah berkaitan dengan teori keagenan. Teori keagenan menerangkan bahwa adanya pelimpahan wewenang dari prinsipal ke agen dimana akan memberikan pertanggungjawaban terhadap pelimpahan kekuasaan tersebut dengan memberikan laporan keuangan yang berkualitas kepada prinsipal. Laporan keuangan yang berkualitas adalah laporan keuangan yang disajikan oleh entitas pelaporan yang harus memiliki empat karakteristik yaitu relevan, andal, dapat dibandingkan dan dapat dipahami (SAP, 2010). Laporan keuangan pemerintah dapat dikatakan berkualitas apabila mengandung karakteristik yang telah ditetapkan sehingga informasi yang dihasilkan dapat menjadi dasar pembuatan keputusan baginya (Rusvianto dan Yuliafitri, 2018).

Pada penelitian sebelumnya telah banyak yang meneliti tentang faktor yang mempengaruhi kualitas laporan keuangan dalam sebuah organisasi. Penelitian yang dilakukan Mahardini dan Miranti (2018) yang meneliti tentang pengaruh penerapan standar akuntansi pemerintahan dan kompetensi sumber daya manusia pada kualitas laporan keuangan Pemerintah Provinsi Banten Tahun Anggaran 2015 yang mengemukakan bahwa hasil dari semua variabel yang diuji berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Hal itu menunjukkan bahwa penerapan standar akuntansi pemerintahan telah diimplementasikan secara nyata dalam proses penyusunan laporan keuangan yang berkualitas, dan dalam berjalanya proses tersebut didukung dengan kompetensi sumber daya manusianya yang mampu menunjukkan

kualitas mutu yang tinggi sehingga dalam proses tersebut melibatkan partisipasi masyarakat dalam meningkatkan kualitas laporan keuangan .

Penelitian ini sejalan dengan yang dilakukan (Ikyarti dan Aprila, 2019) dengan variabel pengaruh penerapan standar akuntansi pemerintahan, implementasi sistem informasi manajemen daerah, sistem pengendalian internal pemerintah terhadap kualitas laporan keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Seluma yang menunjukkan hasil penelitian pengaruh penerapan standar akuntansi pemerintah berpengaruh positif signifikan terhadap kualitas laporan keuangan. Penelitian lain terkait kualitas laporan keuangan berbeda dengan hasil penelitian Inapty dan Mertiningsih (2016) dengan variabel penerapan standar akuntansi pemerintah, kompetensi aparatur dan peran audit internal terhadap kualitas laporan keuangan dan Ramadhan Haty (2018) dengan variabel pengaruh penerapan standar akuntansi pemerintahan, sistem pengendalian internal, kompetensi sumber daya manusia, dan kompetensi staf terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah yang mengemukakan bahwa penerapan standar akuntansi pemerintahan secara signifikan tidak berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan. Hal ini menunjukkan bahwa kurang bermutunya tingkat kompetensi sumber daya manusia dalam berperan menyusun laporan keuangan yang berkualitas.

Beberapa penelitian terdahulu menunjukkan hasil yang tidak konsisten, sehingga perlu dilakukan penelitian yang lebih lanjut tentang kualitas laporan keuangan pemerintah, maka Peneliti tertarik untuk melakukan penelitian yang berbeda dengan penelitian sebelumnya yaitu : pertama berkaitan dengan objek

penelitian Mahardini dan Miranti (2018) dilakukan di Pemerintahan Provinsi Banten sedangkan penelitian ini dilakukan di Kabupaten Pati. Perbedaan kedua, dengan ditambahkan dua variabel independen saran dari jurnal utama yaitu Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Sistem Pengendalian Internal agar lebih terarah dan mendapatkan hasil yang lebih baik (Mahardini dan Miranti, 2018) serta penambahan satu variabel independen Sistem Akuntansi Keuangan Daerah yang masih berkaitan erat dengan kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Dari penambahan tiga variabel tersebut terdapat prinsip keterkaitan yang memungkinkan untuk menunjang kenaikan kualitas laporan keuangan yang akan disajikan oleh pihak pemerintah. Dengan adanya Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Sistem Pengendalian Internal dapat membantu dalam proses kemudahan pengelolaan, pendeteksian tingkat kualitas dan pengawasan jalannya penyusunan laporan keuangan yang disajikan. Sehingga dengan adanya laporan keuangan yang berkualitas mampu memberikan akses informasi mudah dipahami dan tidak menyesatkan semua pihak. Dari beberapa faktor penunjang tersebut keterandalan laporan keuangan pemerintah tentu akan mencapai hasil yang maksimal dan berdampak baik kepada masyarakat.

Berdasarkan uraian diatas, peneliti melakukan penelitian dengan judul :

“ Pengaruh Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan, Kompetensi Sumber Daya Manusia, Pemanfaatan Teknologi Informasi, Sistem Pengendalian Internal, Dan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah

Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (Studi Empiris Pada Organisasi Perangkat Daerah Se-Kabupaten Pati)”

1.2 Ruang Lingkup

Penelitian ini agar menjadi terarah dan memudahkan pembahasan serta tidak menyimpang dari topik yang akan dibahas maka peneliti dibatasi beberapa lingkup permasalahan dalam pembahasan yaitu :

1. Objek penelitian kali ini adalah Organisasi Perangkat Daerah Se- Kabupaten Pati
2. Responden penelitian ditujukan kepada Kepala instansi Organisasi Pemerintah Daerah dan Staf bagian keuangan yang terkait di Kabupaten Pati
3. Penelitian tertuju pada satu arah yaitu untuk menguji secara empiris pengaruh penerapan standar akuntansi pemerintahan, kompetensi sumber daya manusia, pemanfaatan teknologi informasi, sistem pengendalian internal dan sistem akuntansi keuangan daerah terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah Kabupaten Pati
4. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan data primer berupa kuesioner yang diberikan secara langsung kepada pihak instansi (OPD) yang terkait.

1.3 Perumusan Masalah

Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang disajikan pada pihak internal maupun eksternal sejak tahun 2012-2019 mengalami

peningkatan. Dengan adanya peningkatan kualitas yang diberikan oleh pemerintah kepada banyak pihak terkait akan menimbulkan berbagai permasalahan yang terjadi di Organisasi Perangkat Daerah Se-Kabupaten Pati terhadap kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah . Salah satunya adalah keterbatasan sumber daya manusia yang kurang efektif dan handal dalam penyusunan laporan keuangan serta adanya potensi terjadinya penyalahgunaan laporan keuangan ataupun korupsi oleh aparatur pemerintah daerah. Berdasarkan latar belakang yang sudah dijelaskan diatas, rumusan masalah yang digunakan penelitian ini sebagai berikut :

1. Apakah Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah ?
2. Apakah kompetensi sumber daya manusia berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah ?
3. Apakah pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah ?
4. Apakah sistem pengendalian internal berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah?
5. Apakah sistem akuntansi keuangan daerah berpengaruh pada kualitas laporan keuangan pemerintah daerah?

1.4 Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang, ruang lingkup, dan rumusan masalah yang dijelaskan diatas, maka tujuan yang hendak dicapai oleh peneliti dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk menganalisis pengaruh penerapan standar akuntansi pemerintah terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah
2. Untuk menguji secara empiris mengenai pengaruh kompetensi sumber daya manusia terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah
3. Untuk menguji secara empiris mengenai pengaruh pemanfaatan teknologi informasi terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah
4. Untuk menguji secara empiris mengenai pengaruh sistem pengendalian internal terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah
5. Untuk menguji secara empiris mengenai pengaruh Sistem Akuntansi Keuangan Daerah terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah

1.5 Kegunaan Penelitian

Penelitian ini diharap mampu memberi wawasan beberapa pihak terkait manfaat kualitas laporan keuangan pemerintah antara lain sebagai berikut:

1. Kegunaan secara teoritis
 - a. Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat serata menambah pengetahuan, wawasan, dan informasi berkaitan dengan pengaruh penerapan standar akuntansi pemerintahan, kompetensi sumber daya

manusia, pemanfaatan teknologi informasi, sistem pengendalian internal dan sistem akuntansi keuangan daerah. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan referensi dan masukan bagi peneliti selanjutnya dalam bidang kualitas laporan keuangan pemerintah daerah

- b. Bagi masyarakat diharap mampu menjadi penilaian terkait dengan laporan keuangan pemerintah daerah yang telah dikatakan berkualitas atau sebaliknya
- c. Penelitian ini diharapkan dapat memperkuat penelitian-penelitian sebelumnya tentang kualitas laporan keuangan pemerintah daerah

2. Kegunaan secara praktis

a. Bagi Penulis

Penelitian ini memberikan dasar ilmu dan pengalaman untuk menerapkan ilmu pengetahuan saat menempuh pendidikan sarjana dengan membandingkan kondisi nyata dilapangan sesungguhnya.

b. Bagi Organisasi Perangkat Daerah

Bagi Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Kabupaten Pati diharapkan mempunyai manfaat lebih guna sebagai penunjang kontribusi praktik penerapan standar akuntansi pemerintahan, kompetensi sumber daya manusia, pemanfaatan teknologi informasi, sistem pengendalian internal, sistem akuntansi keuangan daerah pada kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.

c. Bagi pihak masyarakat

Bagi masyarakat diharapkan dapat menjadi penilaian untuk menilai bahwa pengelolaan dana desa telah akuntabel atau sebaliknya.

